

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum: Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas Berdasarkan Hukum Perbendaharaan Negara

Irwan Saputra Pajerih, Suryaningsi*, Rosmini

Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

*Corresponding Author's e-mail: suryaningsi@fkip.unmul.ac.id

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 22-08-2024

Accepted: 31-08-2024

© 2024, The Author(s)

Abstract : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU) dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan akuntabilitas sesuai dengan Hukum Perbendaharaan Negara. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, BLU memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan. Studi ini menggunakan metode penelitian, yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, teori-teori hukum, dan filosofi hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan keuangan pada BLU dapat dicapai melalui implementasi manajemen keuangan yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi informasi yang memadai. Selain itu, penegakan prinsip-prinsip hukum perbendaharaan negara menjadi kunci utama dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta penerapan best practices dalam pengelolaan keuangan BLU. Dengan demikian, diharapkan BLU dapat meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas keuangan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

Kata Kunci: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan, Badan Layanan Umum, Efisiensi, Akuntabilitas, Hukum Perbendaharaan Negara



PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai tata kelola yang baik di sektor publik (Hasibuan, 2021). Badan Layanan Umum (BLU) sebagai salah satu entitas pemerintah yang berfungsi menyediakan layanan publik, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya secara efisien dan akuntabel (Ghafur et al., 2024). Namun, pengelolaan keuangan di BLU sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut (Hari et al., 2024).

Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan keuangan di BLU antara lain adalah minimnya transparansi dalam penggunaan dana, rendahnya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, dan kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak terkait (Suryaningsi & Putri, 2024). Selain itu, potensi risiko korupsi dan penyalahgunaan keuangan juga menjadi ancaman serius bagi integritas dan keberlangsungan BLU (Hirwan Ardiansyah, Suryaningsi Suryaningsi, 2024). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan tata kelola keuangan di BLU guna memastikan bahwa sumber daya keuangan yang dimiliki dapat digunakan secara optimal demi kepentingan masyarakat secara luas berkelanjutan (Suryaningsi & Tharuna, 2020).

Salah satu yang dihadapi oleh BLU dalam pengelolaan keuangan antara lain adalah kurangnya transparansi dalam penggunaan dana, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi yang benar, serta adanya potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan (Payamta, 2023). Oleh karena itu, penting bagi BLU untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang baik melalui pembentukan mekanisme pengawasan dan kontrol yang ketat, serta peningkatan kompetensi dan integritas para pengelola keuangan di dalamnya (Nadia & Afifah, Zahratul, 2021). Dengan demikian, BLU dapat lebih efektif dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Salah satu yang dihadapi oleh BLU dalam pengelolaan keuangan antara lain adalah kurangnya transparansi dalam penggunaan dana, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi yang benar, serta adanya potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena (Santoso, Dri; Samsudin, Titin; Hasan, Ahmadi; Imron, Ali; Usman, Rachmadi; Suryaningsi, Suryaningsi; Uhmar, Masyithah; Lawang, 2023) itu, penting bagi BLU untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang baik melalui pembentukan mekanisme pengawasan dan kontrol yang ketat, serta peningkatan kompetensi dan integritas para pengelola keuangan di dalamnya. Dengan demikian, BLU dapat lebih efektif dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

BLU didirikan dengan tujuan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan meningkatkan kualitas layanan kepada Masyarakat (Julia & Sianturi, 2016). Meskipun demikian, fleksibilitas ini harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa setiap dana yang dikelola digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Hukum Perbendaharaan Negara menyediakan kerangka hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan BLU (Syaipudin, 2020). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Perbendaharaan Negara seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, menjadi landasan yang harus diterapkan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan BLU (Moento et al., 2019). Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia,

teknologi informasi yang belum memadai, serta mekanisme pengawasan yang masih lemah.

Diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan BLU agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar lebih mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, investasi dalam teknologi informasi yang lebih canggih juga perlu dilakukan untuk mempercepat proses pengelolaan keuangan dan meningkatkan transparansi. Pengawasan yang lebih ketat dan efektif juga perlu diterapkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan keuangan BLU dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Perbendaharaan Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi pengelolaan keuangan pada BLU dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan akuntabilitas sesuai dengan Hukum Perbendaharaan Negara. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi praktis yang dapat diterapkan oleh BLU untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan mereka. Dengan demikian, BLU dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik, memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, dan turut serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan publik.

Rumusan masalahnya adalah pertama, Bagaimana strategi optimalisasi pengelolaan keuangan dapat diterapkan pada Badan Layanan Umum (BLU) untuk meningkatkan efisiensi? kedua, Bagaimana prinsip-prinsip Hukum Perbendaharaan Negara dapat diimplementasikan secara lebih efektif dalam pengelolaan keuangan BLU?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan *doctrinal* yang mengandung karakter normatif dengan sasaran penelitian pada sekumpulan norma, pada tingkat aplikasi, atau kedalaman penelitian (Muhdar, 2019). Pendekatan ini sampai pada menganalisis *legal theory, jurisprudence, dan legal philosophy*. Serta tidak menghindari penggunaan fakta tertentu sebagai pendukung dalam analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Dapat Diterapkan Pada Badan Layanan Umum (BLU) Untuk Meningkatkan Efisiensi

Optimalisasi pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum (BLU) sangat penting untuk memastikan bahwa layanan publik yang diberikan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah melakukan evaluasi dan audit internal secara berkala. Audit ini tidak hanya berfokus pada aspek keuangan tetapi juga mencakup operasional dan manajerial, sehingga dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan penghematan (Novianti & Suhandha, 2023).

Dengan melakukan evaluasi dan audit internal secara berkala, BLU dapat mengetahui dengan lebih jelas bagaimana keuangan mereka dikelola dan apakah ada potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang mereka berikan. Selain itu, dengan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan penghematan, BLU dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki proses dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka. Ini akan membantu BLU untuk

mencapai tujuan mereka dalam memberikan layanan publik yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Penerapan teknologi informasi dalam sistem keuangan BLU juga menjadi langkah yang krusial (Rinke, 2011). Teknologi ini dapat membantu otomatisasi berbagai proses keuangan seperti pencatatan transaksi, pelaporan, dan pengendalian anggaran. Dengan penggunaan teknologi, risiko kesalahan manusia dapat diminimalkan dan laporan keuangan dapat disusun dengan lebih cepat dan akurat, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Pengelolaan risiko keuangan melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan BLU. Hal ini meliputi risiko-risiko seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Dengan adanya pengelolaan risiko yang baik, BLU dapat meminimalkan potensi kerugian keuangan dan meningkatkan keberlanjutan keuangan mereka. Selain itu, pengelolaan risiko keuangan juga dapat membantu BLU untuk memenuhi standar keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Pengelolaan risiko keuangan adalah elemen penting lainnya dalam strategi ini. BLU harus mengembangkan kebijakan manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi, termasuk fluktuasi pasar dan perubahan kebijakan pemerintah (Gupta et al., 2023). Diversifikasi sumber pendapatan dan pengelolaan likuiditas yang baik dapat membantu mengurangi risiko keuangan.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan juga merupakan faktor kunci dalam optimalisasi ini. Dengan memberikan pelatihan dan pengembangan profesional kepada staf keuangan, BLU dapat memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengelola keuangan dengan efisien (et al. 2022). Pemahaman yang baik tentang regulasi dan kebijakan keuangan juga penting untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas,

Kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya juga dapat meningkatkan kemampuan BLU dalam mengelola keuangan secara lebih efektif. Dengan membangun jaringan kerja sama yang kuat, BLU dapat memperoleh informasi dan saran dari para ahli keuangan yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Selain itu, kerjasama dengan lembaga keuangan lain juga dapat membuka peluang untuk mendapatkan pendanaan tambahan atau investasi yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BLU secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya merupakan langkah penting dalam optimalisasi pengelolaan keuangan BLU.

Selain itu, penerapan sistem insentif berbasis kinerja dapat memotivasi staf untuk bekerja lebih efisien. Insentif ini bisa berupa penghargaan finansial maupun non-finansial, seperti pengakuan atau kesempatan pengembangan karir. Dengan adanya insentif, diharapkan staf akan lebih termotivasi untuk mencapai target efisiensi yang telah ditetapkan.

Sebagai tambahan, penting juga untuk terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja keuangan BLU agar dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dan perubahan yang diperlukan. Selain itu, sinergi antara berbagai unit kerja di dalam BLU juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Dengan demikian, BLU dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang maksimal dalam mendukung program-program pemerintah dan mencapai tujuan organisasi.

Kolaborasi dengan pihak eksternal juga dapat meningkatkan efisiensi keuangan BLU. Kerjasama dengan institusi keuangan, lembaga pendidikan, dan sektor swasta

dapat membuka akses ke sumber daya tambahan atau peningkatan kapasitas operasional (Novianti & Suhandi, 2023). Misalnya, kerjasama dengan lembaga keuangan dapat membantu dalam pengelolaan dana, sementara kerjasama dengan lembaga pendidikan dapat memberikan pelatihan bagi staf.

Evaluasi berkelanjutan terhadap strategi dan praktik pengelolaan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa BLU dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mempertahankan efisiensi. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui umpan balik dari masyarakat atau audit eksternal. Dengan evaluasi yang berkesinambungan, BLU dapat memastikan bahwa mereka tetap fokus pada tujuan utama yaitu memberikan layanan yang berkualitas kepada Masyarakat.

Prinsip-Prinsip Hukum Perbendaharaan Negara Dapat Diimplementasikan Secara Lebih Efektif Dalam Pengelolaan Keuangan BLU

Dalam konteks pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), penerapan prinsip-prinsip hukum perbendaharaan negara menjadi sangat krusial. BLU, sebagai subjek pemerintah yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dan manajemen, harus tetap beroperasi dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip hukum perbendaharaan negara bukan hanya untuk mematuhi regulasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien (Raranta et al., 2023).

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum perbendaharaan negara seperti prinsip kepatuhan, prinsip efisiensi, dan prinsip akuntabilitas menjadi landasan utama bagi BLU dalam mengelola keuangannya. Prinsip kepatuhan mengacu pada kewajiban BLU untuk mematuhi semua regulasi yang berlaku dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal pengeluaran dan penerimaan dana. Prinsip efisiensi menuntut BLU untuk mengelola keuangan dengan cara yang paling hemat dan efektif, sehingga dana yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan prinsip akuntabilitas mengharuskan BLU untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan keuangan, serta memberikan pertanggungjawaban secara transparan kepada publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum perbendaharaan negara secara konsisten, BLU dapat memastikan bahwa keuangan mereka dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip pertama yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BLU berarti bahwa semua transaksi keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun hukum (Ratna Agustin & Sayekti Suindyah Dwiningwarni, 2023). Setiap pengeluaran harus didokumentasikan dengan jelas dan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Dalam hal ini, BLU harus mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses, baik oleh manajemen internal maupun pihak eksternal seperti auditor dan lembaga pengawas.

Selanjutnya, transparansi merupakan prinsip kunci lainnya yang harus diterapkan. Transparansi berarti bahwa informasi terkait keuangan, termasuk laporan anggaran, pengeluaran, dan pendapatan, harus terbuka dan dapat diakses oleh public (Nurhayati, 2017). Ini tidak hanya membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BLU, tetapi juga mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi. BLU dapat menerapkan sistem informasi keuangan yang dapat diakses secara online oleh masyarakat, sehingga semua pihak dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan dana publik.

Prinsip efisiensi dalam hukum perbendaharaan negara juga sangat relevan untuk BLU. Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya keuangan secara optimal untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Stewart, 2009). BLU perlu mengadopsi praktik pengadaan yang efisien dan hemat biaya, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan nilai maksimal. Penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi proses keuangan dan manajemen dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi ini.

Kepatuhan terhadap regulasi merupakan aspek penting lainnya dalam penerapan hukum perbendaharaan negara. BLU harus mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik yang bersifat umum seperti UU Keuangan Negara maupun yang spesifik untuk BLU. Kepatuhan ini mencakup pelaporan keuangan, penggunaan anggaran, dan prosedur pengadaan. BLU juga harus memastikan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam pengelolaan keuangan memahami dan menerapkan regulasi ini dalam pekerjaan sehari-hari (Susanto et al., 2022).

Pengawasan dan evaluasi juga merupakan bagian integral dari penerapan prinsip-prinsip hukum perbendaharaan negara. BLU harus membangun sistem pengawasan internal yang kuat, yang mencakup mekanisme untuk mendeteksi dan menindaklanjuti penyimpangan (Karunia & Nasution, 2022). Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan untuk mengidentifikasi area perbaikan.

Implementasi prinsip-prinsip hukum perbendaharaan negara dalam pengelolaan keuangan BLU juga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi staf keuangan BLU sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan secara profesional (Andrayani et al., 2022). Ini termasuk pemahaman tentang regulasi, standar akuntansi, dan teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip manajemen risiko juga diperlukan untuk memastikan keuangan BLU dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan yang terus-menerus, staf keuangan BLU dapat terus meningkatkan kualitas layanan keuangan yang mereka berikan dan juga memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan keuangan BLU dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum perbendaharaan negara secara efektif, BLU dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membantu dalam mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Optimalisasi pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum (BLU) sangat penting untuk memastikan layanan publik berjalan efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan. Langkah-langkah awal mencakup evaluasi dan audit internal berkala untuk mengidentifikasi area perbaikan, serta penerapan teknologi informasi untuk otomatisasi proses keuangan, mengurangi risiko kesalahan, dan mempercepat pelaporan. Manajemen risiko keuangan melalui kebijakan komprehensif dan diversifikasi pendapatan juga krusial, bersama dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sistem insentif berbasis kinerja. Kolaborasi dengan pihak eksternal dan evaluasi berkelanjutan terhadap strategi pengelolaan keuangan memastikan BLU dapat beradaptasi dengan perubahan. Prinsip-prinsip hukum

perbendaharaan negara, seperti akuntabilitas dan transparansi, harus diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah korupsi. Efisiensi menekankan penggunaan optimal sumber daya keuangan, dan kepatuhan memastikan semua kegiatan sesuai dengan regulasi. Pengawasan dan evaluasi berkala, serta pelatihan berkelanjutan bagi staf, mendukung pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan BLU.

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum (BLU), disarankan untuk melakukan evaluasi dan audit internal berkala guna mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, serta menerapkan teknologi informasi untuk otomatisasi proses keuangan, yang akan mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat pelaporan. Manajemen risiko yang komprehensif dan diversifikasi pendapatan harus diimplementasikan, diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sistem insentif berbasis kinerja. Kolaborasi dengan pihak eksternal dan evaluasi berkelanjutan terhadap strategi pengelolaan keuangan perlu dilakukan untuk memastikan adaptasi terhadap perubahan. Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam hukum perbendaharaan negara sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah korupsi. Pengawasan yang kuat dan evaluasi berkala, serta pelatihan berkelanjutan bagi staf, akan mendukung pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan oleh BLU.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrayani, L., Rivai Zainal, V., Christina Nawangasri, L., & W. Hariadi, W. (2022). Pelatihan Dan Pengembangan Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(6), 836–842. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i6.365>
- Ghafur, A., Studi, P., Hukum, M., & Mulawarman, U. (2024). Pertanggungjawaban Negara atas Pengalihan Kewenangan Pengawasan Tambang: Kasus Kolam Bekas Tambang di Kalimantan Timur. *Seikat : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(4), 1–8.
- Gupta, S., Mohite, S., Nisarga, S., & Shaikh, M. (2023). A Study on Risk Management Strategies. *REST Journal on Banking, Accounting and Business*, 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.46632/jbab/2/2/18>
- Hari, A., Marbun, S., & Suryaningsi Suryaningsi, R. R. (2024). Analisis Lembaga Pengelola Investasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 3(4), 1–8.
- Hasibuan, A. R. D. (2021). Penerapan Tata Kelola Keuangan Pendidikan Sekolah Dasar Pada Akhir Periode Tahun 2020. *Juripol*, 4(1), 304–309. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11051>
- Hirwan Ardiansyah, Suryaningsi Suryaningsi, R. R. (2024). Meningkatkan Solusi Praktis Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Melalui Pembentukan Undang-Undang Perubahan Iklim. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 230–246.
- Julia, T., & Sianturi, A. M. (2016). Pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Terhadap Kinerja Finansial, Kinerja Non Finansial Dan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus Pada: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–17.
- Karunia, D., & Nasution, L. (2022). Integration of the State Financial Supervision and Audit System in Public Legal Entities. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.15408/siclj.v6i1.28473>

- Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). Good Governance Dalam Pemerintahan. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), 10–16. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*. April, 1–90. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12690.20169>
- Nadia, H., & Afifah, Zahratul, S. S. (2021). Analisis Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(11), 1–7.
- Novianti, L., & Suhandi, S. (2023). Badan Layanan Umum : Sebuah Inovasi Kelembagaan Pemerintahan. *Owner*, 7(2), 1490–1502. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1306>
- Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1(2). <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1062>
- Payamta. (2023). *AUDIT SEKTOR PUBLIK: MEMBANGUN PILAR INTEGRITAS PEMERINTAHAN: Vol. PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA*.
- Puspitawati, L., & Virginia, M. (2022). Human Resources Competency in The Successfull Of Financial Digitization and Its Impact on The Financial Statement Performance in society 5.0. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*, 746–757. <https://doi.org/10.34010/icobest.v3i.209>
- Raranta, R., Sendouw, R. H. E., & Kantohe, M. (2023). Financial Management of State Universities as Public Service Agency in Supporting The Development of Human Resources and Facilities (Study at the Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Manado). *Technium Social Sciences Journal*, 52, 63–72. <https://doi.org/10.47577/tssj.v52i1.10235>
- Ratna Agustin, & Sayekti Suindyah Dwiningwarni. (2023). Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 280–286. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.891>
- Rinke, D. (2011). Improving the Information in Financial Statements. *International Journal of Business and Social Science*, 2(18), 64–70.
- Santoso, Dri; Samsudin, Titin; Hasan, Ahmadi; Imron, Ali; Usman, Rachmadi; Suryaningsi, Suryaningsi; Uhmar, Masyithah; Lawang, K. A. (2023). Quo vadis of islamic law in national law 1. *Russian Law Journal*, XI(3), 669–679.
- Stewart, J. (2009). The Impact of Efficiency. In *Public Policy Values*. https://doi.org/10.1057/9780230240759_5
- Suryaningsi, S., & Putri, N. A. (2024). Against The Practice of Money Politics : An Analysis of The Potential For Bribery Prevention In The Conduct of Elections. *JOURNAL of MUJADDID NUSANTARA*, 8030, 4–5.
- Suryaningsi, S., & Tharuna, Q. M. (2020). The Review of Corrupton Eradication in Indonesia Basec on the Aspect of Juidical, Morality, and Ideology of Pancasila. *Awang Long Law Review*, 2(2), 93–106.
- Susanto, H., Universitas, P., Ageng, S., Universitas, P., & Ageng, S. (2022). *Efektivitas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terhadap Pengawasan Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak How to cite : Heri Susanto , Firdaus , Danial , “ Efektivitas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terhadap Pengawasan Barang Milik Daerah Kabup. 2(1), 257–267.*
- Syaipudin. (2020). Reform of Planning, Budgeting of State Revenue and Expenditure and Management of State Finance Based on Law No 17 Year 2003 on State Finance. *The International Journal of Business & Management*, 8(2), 153–163. <https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i2/bm2002-060>

Syarif, M., Yusri, A., & Amir, M. (2023). Reducing The Use Of Cement With Marble Waste For Seaside Concrete Construction Through The Graphite Carbon Particles System. *ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences*.